



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKAMTA**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **466504**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.562.936.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/60 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 312.936.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/54 m2 di KLATEN, WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/110 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 987 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 295.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW YARIS 1.5 S M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000

5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 68.350.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 204.923.345

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.131.209.345

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.131.209.345

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.